

DAFTAR BACAAN

Buku

Garner, Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary 8th edition*, West Publishing, Saint Paul, 2004.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Laksono, Fajar, Winda Wijayanti, Anna Triningsih, dan Nuzul Qur'aini Mardiya, *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Tentang SBI/RSBI*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 2009.

Pramono, Nindyo, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2008

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cet. XXIII, Intermasa, Jakarta, 2010.

Supriyanto, *Metodologi riset manajemen Sumber daya Manusia*, UIN Maliki Press, Malang, 2010.

Witanto, DY, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2015.

Jurnal

Mariam Darus Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 2000.

Internet

Muchamad Ali Safa'at, Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK, safaat.lecture.ub.ac.id, Februari 2014, dikunjungi pada tanggal 10 Januari 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad Nomor 52 Tahun 1847
jo. Staatsblad Nomor 63 Tahun 1849)*

*Het Herzien Inlandsch Reglement (Staatsblad Nomor 16 Tahun 1848 jo.
Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941)*

Rechtsreglement Buitengewesten (Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia
Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5691)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1172)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 419)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360)